

IMPLEMENTASI MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KEMENTERIAN AGAMA

Fhadillah

Institut Agama Islam Negeri Parepare
fhadillah@iainpare.ac.id

Muh. Akib D

Institut Agama Islam Negeri Parepare
muhakibdollah@gmail.com

Yessica Noviasmy

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic
Science)

Volume: 1
Nomor: 2
Halaman: 17-29
Parepare, Oktober 2023

Tanggal Masuk:
25 Agustus 2023
Tanggal Revisi:
30 Oktober 2023
Tanggal Diterima:
31 Oktober 2023

Keywords: Management of
Islamic education institutions,
Quality of Islamic education,
Ministry of Religious Affairs

Kata Kunci: Manajemen
lembaga pendidikan Islam,
Mutu pendidikan Islam,
Kementerian agama

ABSTRACT

This article discusses the implementation of the management of Islamic education institutions in improving the quality of Islamic religious education at the Ministry of Religion. One of the institutions that manage Islamic religious education is the Ministry of Religious Affairs, which carries out autonomous management of education from planning, organizing, implementing to evaluating development. But in the change of autonomous authority. In a management of education has not fully made education better because only regions with high policy support, financial capability and good human resources (HR) can optimize efforts to improve the quality of Islamic religious education. The author uses the observation method in obtaining data to support the writing of this article, the author also makes a literature study as a complement to clarify the information or data obtained during PPL at the Ministry of Religious Affairs.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implementasi manajemen lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di Kementerian Agama. Salah satu lembaga yang mengelola pendidikan agama Islam adalah Kementerian Agama yang melaksanakan pengelolaan pendidikan secara otonom mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi dari pengembangan. Namun dalam perubahan wewenang otonom. Dalam sebuah pengelolaan pendidikan belum sepenuhnya menjadikan pendidikan itu lebih baik karena hanya daerah-daerah dengan dukungan kebijakan yang tinggi, kemampuan keuangan dan sumber daya manusia (SDM) yang baik dapat mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama islam.



Author correspondence email: fhadillah@iainpare.ac.id



Available online at: DOI



All rights reserved. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penulis menggunakan metode observasi dalam memperoleh data untuk mendukung penulisan artikel ini, penulis juga menjadikan studi kepustakaan sebagai pelengkap untuk memperjelas informasi atau data yang diperoleh selama PPL di Kementerian Agama.

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan mempunyai peran yang besar dan sekaligus merupakan sumber daya yang penting, khususnya bagi Negara yang sedang berkembang. (Wahono et al., 2018)

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu. (Thoah, 1999)

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran /kuliah agama. (Indonesia, 2003)

Pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. (Nelly et al., 2020) Dalam mewujudkan manusia yang unggul semacam itu tidak terlepas dari bagaimana pencetakan manusia semacam itu tercapai. Hal ini tidak terlepas dari pada pendidikan agama sebagai pondasi cara mereka berpikir, berperilaku serta bagaimana menyelesaikan suatu persoalan yang tertata rapi dalam system pendidikan nasional. Sifat teladan merupakan alat pendidikan yang paling penting dalam pendidikan Islam. Makanya para pendidik, baik orang tua maupun guru, diwajibkan untuk menempatkan dirinya sebagai sosok teladan bagi putra-putri dan peserta didik mereka. Sejalan dengan hal itu, maka pendidikan Islam menempatkan Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. (Achadi, 2018)

Salah satu lembaga yang mengelola pendidikan agama islam adalah Kementrian Agama yang melaksanakan pengelolaan pendidikan secara otonom mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi dari pengembangan. Namun dalam perubahan wewenang otonom Dalam sebuah pengelolaan pendidikan belum sepenuhnya menjadikan pendidikan itu lebih baik karena hanya daerah-daerah dengan dukungan kebijakan yang tinggi, kemampuan keuangan dan sumberdaya manusia (SDM) yang baik dapat mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama islam. (Susanti & Sa’ud, 2016) maka dengan itu sebaliknya daerah yang memiliki keterbatasan anggaran serta lemahnya komitmen maka selogan hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan hanya merupakan realitas tanpa objektivitas.

Disisi lain selain dari daerah, tantangan pendidikan datang dari perspektif kualitas pendidikan menjadi tuntutan di era milenial untuk kemudian menyiapkan sumber daya yang dapat bersaing dengan dunia global. Tanggung jawab dan peran seorang pendidik dan

kependidikan amatlah berat dan tidak semudahnya yang dibayangkan atau diucapkan, sebab pendidik merupakan sebuah kader-kader bangsa yang serba unik dan kompleks karena pendidik harus siap dalam menghadapi sebuah tantangan pendidikan di masa yang akan datang. (Nurdiansyah, 2016) Untuk mengelola lembaga dengan baik diperlukan manajemen yang dapat mengatur seluruh potensi lembaga agar berfungsi dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan lembaga. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong lembaga untuk dapat mewujudkan visi, misi dan sarana melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu lembaga pendidikan memiliki cara untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di lembaganya.

Dalam bidang pendidikan Islam, perencanaan strategis merupakan salah satu faktor kunci efektivitas terlaksananya aktivitas pendidikan dan peningkatan mutu, demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal. Hal tersebut tentunya juga akan berdampak baik bagi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agama Islam. Akan tetapi, perencanaan strategis mutu pendidikan, yang seharusnya menjadi bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pendidikan Islam seringkali diabaikan dan belum menjadi tradisi dalam pengembangan pendidikan Islam. Pentingnya perencanaan yang handal dalam lingkup pendidikan Islam, karena pendidikan Islam diyakini oleh umat Islam sebagai jalan hidup manusia yang paling baik. (Dhuka, 2022)

Sarana yang paling strategis untuk mewujudkan peningkatan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Akan tetapi, bidang pendidikan yang strategis ini akan bermakna dan dapat mencapai tujuannya apabila pendidikan tersebut memiliki sistem yang relevan dengan pembangunan dan kualitas yang tinggi baik dari segi proses maupun hasilnya. Mengelola dan mengembangkan pendidikan agama islam menjadi maju dan bermutu terletak pada mutu warga lembaga, yaitu kepala kantor, pegawai, staf administrasi, masyarakat serta iklim dan kultur disekitarnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan agama islam melalui pengelolaan seksi PAIS di Kementrian Agama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama PPL di Kementrian Agama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam yang kita ketahui secara familiar memiliki dua makna secara terminologi yakni; Pertama, pendidikan tentang Islam. Kedua, pendidikan menurut Islam. terminologi pertama lebih memandang Islam sebagai subjek matter dalam pendidikan, sedangkan term yang kedua lebih menempatkan Islam sebagai perseptif dalam Pendidikan Islam. term yang kedua dipilih sebagai term dalam pembahasan kali ini. Karena masyarakat harus mengetahui bagaimana Pendidikan Islam dari kacamatan Islam. Pendidikan Islam diartikan sebagai proses pengarahan perkembangan manusia, pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. (Ramadhan, 2021) Dengan melihat definisi yang dituliskan oleh Muhammad Hamid An-Nashir ini kita bisa mengetahui bahwa pendidikan Islam bukan saja mengarahkan manusia untuk menjadi orang yang bisa mengetahui ilmu pengetahuan, tetapi disitu juga ditekankan aspek religiusitas dan kearifan dalam pendidikan Islam.

Dengan carut marutnya sistem pendidikan Islam yang di Indonesia, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pendidikan kita, ini harus ada revitalisasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman. Manajemen sendiri berasal dari kata *to manage*, sinonim dari *to hand* artinya menguasai, *to control* artinya memeriksa, *to guide* berarti memimpin. Dalam melihat arti kata manajemen terdapat tiga pandangan yang berbeda, pertama, dimaknai lebih umum dari pada manajemen, kedua, melihat manajemen lebih umum dari pada administrasi, ketiga, pandangan yang menganggap bahwa manajemen sama dengan administrasi. (Munir & Saifulloh, 2020) Dengan pengistilahan ini dan dilihat dari fungsinya antara manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama. Oleh karena itu, perbedaan maupun persamaan diantara keduanya tidak urgen dan konsisten. Dalam memahami istilah manajemen, pendekatan yang harus diaplikasikannya adalah berdasarkan pengalaman seorang pimpinan. Manajemen sebagai suatu sistem merupakan suatu proses untuk mencapai target organisasi secara maksimal dan komprehensif. Maka untuk mencapai tujuan itu perlu dilaksanakan perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Jadi manajemen diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat manusia atau non manusia sehingga tujuannya bisa tercapai secara efektif. (Shofiyullah & Kasanova, 2020)

Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaannya, pemerintah membentuk Kementerian Agama yang memegang kewenangan utama dalam penyelenggaraan bidang agama. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah terkait dengan pengembangan institusi pendidikan Islam. Namun, kewenangan Departemen Agama yang terkait dengan pendidikan Islam telah melahirkan sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada kultural dan politis. Secara kultural, pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Parepare dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyebar. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini.

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Manajemen pendidikan adalah manajemen yang ditetapkan dalam pengembangan pendidikan. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya. Sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang ditetapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam arti, bagaimana menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil proses pendidikan itu sendiri. Sudah barang tentu manajer dan leader yang islami atau yang sudah dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam dan yang berciri khas Islam, harus melekat pada manajemen pendidikan Islam. (Muhaimin, 2010)

Dasar manajemen pendidikan Islam secara garis besar ada 3 (tiga) yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah dan Atsar serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Al-Qur'an Banyak Ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa menjadi dasar tentang manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelaahan secara mendalam. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. AtTaubah: 122). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam menegaskan tentang pentingnya manajemen, di antaranya manajemen

pendidikan, lebih khusus lagi manajemen sumber daya manusia.(Sofyan & Iqbalullah, 2021)

2. Sunnah dan Atsar Rasulullah SAW adalah juru didik dan beliau juga menjunjung tinggi terhadap pendidikan dan memotivasi umatnya agar berkiprah dalam pendidikan dan pengajaran. Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya maka Allah akan mengekangnya dengan kekang berapi (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan pada hadits tersebut, Rasulullah SAW memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Di samping itu, beliau juga punya perhatian terhadap manajemen, antara lain dalam sabda berikut: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqon (tepat, terarah, jelas dan tuntas) (HR. Thabrani) Sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin abi Thalib ra mengatakan: Perkara yang batil (keburukan) yang tertata dengan rapi bisa mengalahkan kebenaran (perkara) yang tidak tertata dengan baik.(Shodiq & Ahmad, 2020)
3. Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 bahwa: “Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Disebutkan pula dalam Pasal 30 ayat 2 bahwa “Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya 31 dan/atau menjadi ahli ilmu agama”.(Fitri, 2016)

Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu : Keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Isi pengarahan baik yang berupa perintah, larangan, maupun bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan diluar kemampuan sipenerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka jangan berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh sipenerima pengarahan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa fungsi pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh- sungguh dan bersemangat disertai keikhlasan yang sangat mendalam.

Mutu Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di Indonesia sekarang ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Sebagian pengamat pendidikan berpendapat bahwa krisis ekonomi dan politik yang melanda masyarakat Indonesia secara berkepanjangan disebabkan terutama oleh krisis moral yang menandakan bahwa PAI belum sepenuhnya berhasil membina masyarakat, khususnya masyarakat peserta didik, untuk menjadi insan yang beriman dan bertaqwa dan mampu mencegah umat Islam dari praktikpraktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang didorong oleh sikap hidup komsumeristik, materialistik, dan hedonistik. Perkembangan zaman yang semakin kompleks sekarang ini memerlukan pengenalan pendidikan agama sejak usia dini kepada anak- anak.(Fitri, 2016)

Perkembangan zaman ini membawa dampak positif, juga dapat memberikan dampak negatif yang perlu diwaspadai terutama bagi generasi muda Indonesia. Di lain pihak selain pendidikan yang berasal dari keluarga, lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal, merupakan jalur utama dan jalur yang sangat efektif dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda. Jadi pengenalan pendidikan agama melalui jalur lembaga pendidikan tertentu merupakan cara/langkah yang efektif. Pengenalan tersebut salah satunya dapat dilaksanakan dengan cara membangun sekolah- sekolah Islam, mulai dari Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum dalam satu kompleks. Sehingga lingkungan yang tercipta dapat terkontrol dan agamis, selain itu pendidikan yang tercipta juga selalu berkesinambungan. Berdasar pada uraian di atas, lembaga pendidikan Islam terpadu merupakan alternatif solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia muslim agar tercapai manusia yang dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.

Pada hakekatnya, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan ini disebabkan antara lain; masalah manajemen pendidikan yang kurang tepat, penempatan tenaga tidak sesuai dengan bidang keahliannya (termasuk didalamnya pengangkatan kepala madrasah sekolah yang kurang profesional bahkan hanya mengutamakan nuansa politis dari pada profesionalisme), penanganan masalah bukan pada ahlinya, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan secara signifikan. Menurut Sidi telah diupayakan tidak kurang 12 strategi pembangunan pendidikan nasional, antara lain

- 1) Menerapkan perencanaan berbasis kompetensi lokal.
- 2) meningkatkan pemerataan pendidikan.
- 3) menetapkan sistem manajemen mutu secara menyeluruh.
- 4) meriview kurikulum secara pereodik serta mengembangkan implementasi kurikulum secara kontinyu.
- 5) merancang proses penerapan pendekatan dan metode serta isi pendidikan yang memberi kesempatan luas kepada peserta didik dan warga belajar untuk mengembangkan potensi kemampuannya secara luas.
- 6) meningkatkan system manajemen sumber pendidikan yang lebih adil dan memadai serta mendayagunakan dan memobilisasi sumber dana secara efisien.
- 7) Menyusun rambu-rambu kebijakan pengembangan program pendidikan yang luwes.
- 8) Membuat peraturan perundangan yang mengatur perimbangan peran pemerintah dan non pemerintah dalam pendidikan secara komprehensif.
- 9) Mengurangi unit birokrasi yang dipandang kurang bermanfaat.
- 10) Mengupayakan secara konsisten dukungan dana yang memadai terutama untuk prioritas program pendidikan sebagai public goods.
- 11) menjaga konsistensi dan berkelanjutan internalisasi nilai-nilai pendidikan nasional diantara tiga pusat pendidikan; yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, dan
- 12) Mengkaji pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada life skill. Untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan banyak orang atau masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab sekolah, tetapi merupakan tanggungjawab dari semua pihak termasuk didalamnya orang tua dan dunia usaha sebagai customer internal dan eksternal dari sebuah lembaga pendidikan.(Sidi, 2001)

Arcaro S Jerome menyampaikan bahwa terdapat lima karakteristik lembaga pendidikan yang bermutu yaitu :

- 1) Fokus pada pelanggan.
- 2) Keterlibatan total
- 3) Pengukuran
- 4) Komitmen
- 5) Perbaikan berkelanjutan.(Arcaro, 2007)

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu. Suryadi Poerwanegara menyampaikan ada enam unsur dasar yang mempengaruhi suatu mutu layanan pendidikan : 1) Manusia 2) Metode 3) Mesin 4) Bahan 5) Ukuran 6) Evaluasi Berkelanjutan.

Terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam perbaikan mutu pendidikan yaitu :

- 1). Ketepatan waktu pelayanan;
- 2). Akurasi pelayanan;
- 3). Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
- 4). Tanggung jawab;
- 5). Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana;
- 6). Kemudahan mendapatkan pelayanan;
- 7). Variasi model pelayanan;
- 8). Pelayanan pribadi;
- 9). Kenyamanan;
- 10).Atribut pendukung lainnya.(Lukman, 1999)

Kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara atau perilaku petugas dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu aparat pemerintah hendaknya memperhatikan dimensi-dimensi di atas untuk menciptakan kepuasan masyarakat. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, karena memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk mengubah kultur yang telah melingkupi pola sikap dan perilaku birokrasi pemerintah selama ini. Perubahan paradigma pelayanan harus diikuti dengan perubahan kultur, sikap, dan perilaku aparat pemerintah selaku pelayan masyarakat. Pelayanan tidak hanya sebagai wacana saja tetapi dengan sepenuh hati diimplementasikan dalam perilaku melayani sehari-hari. Aparatur pemerintah yang mendapatkan kepercayaan untuk melayani masyarakat perlu menyadari bahwa dirinya dituntut untuk memberikan pelayanan untuk di perlukan sifat sebagai berikut(Dwimawanti, 2004):

- 1) Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi;
- 2) Berpikir kreatif dan inovatif;
- 3) Berpikir sistemik dan jauh kedepan;
- 4) Mampu mengoptimalkan sumber daya yang potensial.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat mutu layanan pendidikan adalah:

- 1) Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum;
- 2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- 3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.(Hardiyansyah, 2018)

Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;

- 2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;
- 3) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; (Monoarfa, 2012)

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) yang menguntungkan bagi pemberi layanan, reputasi yang semakin baik di mata pelanggan, serta laba (PAD) yang diperoleh akan semakin meningkat. (Tjiptono, 2000)

Implementasi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama

Pentingnya pengelolaan dalam sebuah kehidupan sudah dikenal sejak zaman kenabian terdahulu, seperti pengelolaan di zaman Nabi Yusuf. Dalam sejarahnya, Nabi Yusuf adalah sosok nabi yang memiliki kekuatan manajerial yang sangat handal dan profesional, sehingga menjadi salah satu contoh nyata bagi umat manusia sampai saat ini. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. Yusuf ayat 55: “Berkata Yusuf: ‘Jadikan aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi perpengetahuan.’” (Kementerian Agama RI, 2010)

Sejarah bagaimana pentingnya fungsi pengelolaan di zaman kenabian di atas menunjukkan bahwa keberadaan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Parepare memiliki peran penting dan tanggungjawab pengelolaan dalam mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di satuan pendidikan di wilayah Kota Parepare dengan baik, khususnya pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemenag Kota Parepare diberikan tugas memberikan bimbingan pembinaan, dan bantuan profesional kepada guru PAI terkait pembinaan kemampuan dan kecakapan dalam konteks isu-isu kekinian dalam bidang pendidikan Islam. Tanpa adanya pengelolaan, tidak mungkin tujuan pendidikan yang diharapkan dapat terwujud dengan baik, efektif, efisien, dan optimal.

Implementasi pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Kemenag Kota Parepare pada dasarnya mengacu pada rencana program yang telah dibuat, yakni rencana program akademik dan manajerial. Program akademik ditujukan kepada pengelolaan pendidikan bagi guru PAI di sekolah, sedangkan program manajerial ditujukan kepada kepala sekolah sebagai *topleader* di satuan pendidikan. Maka dari itu, secara umum pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Kemenag Kota Parepare adalah mengelola pembinaan, bimbingan teknis, dan pelayanan di bidang Kelembagaan Pendidikan Agama Islam, dalam yang hal ini adalah guru PAI, dengan cara menyusun program kerja, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur yang berlaku. Adapun implementasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan

mutu pendidikan agama islam oleh Kemenag Kota Parepare dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Menyusun teknis pelaksanaan program kerja, bahan, dan kelengkapan kegiatan. Setiap kegiatan pelaksanaan kegiatan, tentu dimulai dari perencanaan. Perencanaan yang baik harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan terukur. (Dunan, 2018) Kemenag Kota Parepare secara kontinyu dan profesional dalam menyusun teknis implementasi program kerja, bahan dan kelengkapan kegiatan dalam konteks pembinaan dan bimbingan teknis Pendidikan Agama Islam bagi guru, siswa, pengawas, dan satuan pendidikan (sekolah). Dalam mengelola pendidikan bagi guru, penyusunan teknis tersebut dijadikan pijakan untuk diimplementasikan secara baik demi meningkatkan kompetensi guru PAI di wilayah Kota Parepare. Adapun uraian penyusun teknis pelaksanaan program kerja dari Kemenag Kota Parepare dalam meningkatkan kompetensi guru PAI adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis Program Kerja
Hal ini berupa teknik yang dipilih oleh Kemenag Kota Parepare dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan bagi guru PAI, yakni salah satunya berupa jenis program observasi untuk memantau kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI tersebut di sekolahnya masing-masing.
 - b. Tujuan penyusunan teknis pelaksanaan program
Penyusunan program kegiatan bagi guru PAI oleh Kemenag Kota Parepare memiliki tujuan, di antaranya:
 - 1) meningkatkan kompetensi guru PAI terhadap kurikulum yang terfokus pada pengembangan silabus sesuai kebutuhan pendidikan kekinian, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan rancangan proses pembelajaran di kelas.
 - 2) mengembangkan metode dan model pembelajaran yang lebih variatif, sehingga antusiasme peserta didik semakin meningkat.
 - 3) menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dimiliki oleh guru PAI itu sendiri.
 - 4) melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan komprehensif dengan mengacu pada tuntutan penguasaan kompetensi pendidikan dari pemerintah pusat.
2. Menentukan waktu, tempat, peserta, dan narasumber kegiatan. Untuk memaksimalkan pembinaan dan bimbingan terkait optimalisasi. Pendidikan Agama Islam, Kemenag Kota Parepare juga menyusun rencana teknis implementasi program kerja, data, dan perlengkapan terkait kegiatan tersebut. Adapun rencana yang sering dilakukan adalah penentuan waktu yang tepat, tempat yang representatif, peserta yang sesuai target sasaran narasumber yang kompeten, dan mengkonsep kegiatan lainnya dalam menunjang kesuksesan kegiatan tersebut.
3. Mengimplementasikan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan Islam. Kemenag Kota Parepare telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI di sekolah-sekolah umum di wilayah Kota Parepare. Adapun kegiatan yang selama ini telah rutin dijalankan sebagaimana berikut:
 - a. Bimbingan teknis penyusunan soal

Kemenag Kota Parepare memiliki program bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan soal mata pelajaran. Pendidikan Agama Islam bagi guru-guru PAI. Melalui MGMP PAI, Kemenag Kota Parepare telah memiliki bank soal mata pelajaran PAI dari hasil bimbingan teknis tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, memudahkan guru PAI untuk mengambil berbagai soal untuk dijadikan sebagai alat ukur ujian harian dan ujian semester bagi peserta didiknya. Walaupun demikian, guru PAI juga diminta untuk mengembangkan soal yang ada dan disesuaikan dengan realitas situasi, kondisi, dan ciri khas sekolah yang mereka masing-masing.

- b. Sosialisasi Pemberkasan Usulan Tunjangan Profesi Guru PAI Demi menunjang kompetensi guru PAI, Kemenag Kota Parepare secara konsisten mensosialisasikan bagaimana pemberkasan usulan penerimaan tunjangan profesi guru PAI di wilayah Kota Parepare. Kegiatan ini harus terus dilakukan agar kualitas dan kuantitas guru PAI dari tahun ke tahun semakin baik dan bertambah. Semakin profesional seorang guru PAI, semakin baik pula tunjangan yang didapatkannya. Hal ini menjadi harapan dari Kemenag Kota Parepare.
- c. Melaksanakan Kegiatan Tahunan MTQ Tingkat Kota Parepare. Selama bertahun-tahun, Kemenag Kota Parepare telah menyelenggarakan kegiatan perlombaan keagamaan MTQ Pelajar tingkat Kota Parepare. Bahkan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan keagamaan terbesar yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kemenag Kota Parepare dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Dengan adanya kerjasama yang baik, kegiatan ini dijadikan ikon penting dan rujukan kualitas keagamaan antar sekolah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Kemenag Kota Parepare setiap tahun melakukan koordinasi terkait sekolah mana yang siap dijadikan 'tuan rumah', sehingga setiap tahun tempat penyelenggaraan MTQ ini berbeda, tergantung kesepakatan bersama. Hal tersebut tidak lain adalah demi menjalin tali silaturahmi antara Kemenag Kota Parepare dan sekolah-sekolah di lingkungan Kota Parepare dengan sekolah penyelenggara, sehingga tercipta suasana harmonis, kekeluargaan, dan optimistis (Hasil wawancara dengan ibu Anita, 8 Juli 2023).
4. Memantau dan mengendalikan teknis pelaksanaan program kerja, data, dan perlengkapan. Secara umum, Kemenag Kota Parepare memiliki komitmen dalam memantau dan mengendalikan teknis pelaksanaan program kerja, data dan perlengkapan terkait teknis pembinaan dan bimbingan bagi guru PAI, siswa, pengawas, dan sekolah (PAUD/TK), SD, SMP, SMA/SMK, SLB, FKG PAI, dan MGMP PAI. Pemantauan dan pengendalian tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam berbagai implementasinya. Dalam konteks pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru PAI, pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenag Kota Parepare ini menjadi urgen dan sangat strategis, tidak hanya agar tidak terjadi penyimpangan, tetapi juga mampu memberikan terobosan solutif terhadap problematikan implementasi program kerja yang dijalankan. Adanya hal tersebut, guru PAI dapat terus memperbaiki kinerja dan proses pembelajaran yang lebih optimal demi menjaga kualitas pendidikan Islam di wilayah Kota Parepare.
5. Mengkoordinasi implementasi pengelolaan dengan unit atau instansi lain. Kemenag Kota Parepare secara terus menerus berkoordinasi dengan unit dan atau instansi lain

terkait bagaimana implementasi pembinaan dan pembimbingan teknis Pendidikan Agama Islam bagi guru PAI, siswa, pengawas, dan sekolah (PAUD/TK), SD, SMP, SMA/SMK, SLB, FKG PAI, dan MGMP PAI. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana secara terpadu, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Dalam meningkatkan kompetensi guru PAI sendiri, Kemenag Kota Parepare berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam melaksanakan kegiatan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) tingkat Pelajar se-Kota Parepare. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang secara rutin dikoordinir oleh Kemenag Kota Parepare dengan menggerakkan guru-guru PAI di bawah naungan MGMP PAI Kota Parepare.

6. Melaporkan hasil pengelolaan pendidikan sebagai pertanggungjawaban Kemenag Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendidikan bagi guru-guru PAI selalu melaporkan hasil kegiatannya, baik ke Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Parepare, maupun ke masyarakat umum melalui website dan media milik Kemenag Kota Parepare sendiri. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan hasil pengelolaan tersebut juga bisa dijadikan bahan evaluasi dan referensi untuk kegiatan-kegiatan serupa ke depannya.

KESIMPULAN

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Manajemen pendidikan adalah manajemen yang ditetapkan dalam pengembangan pendidikan. Manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang ditetapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam arti, bagaimana menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil proses pendidikan itu sendiri. Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengajaran yang diberikan kepada orang yang diberi pengajaran dapat dilaksanakan dengan baik maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu: Keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat.

Implementasi pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Kemenag Kota Parepare pada dasarnya mengacu pada rencana program yang telah dibuat, yakni rencana program akademik dan manajerial. Program akademik ditujukan kepada pengelolaan pendidikan bagi guru PAI di sekolah, sedangkan program manajerial ditujukan kepada kepala sekolah sebagai topleader di satuan pendidikan. Adapun implementasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam oleh Kemenag Kota Parepare dapat dijelaskan sebagaimana berikut: menyusun teknis pelaksanaan program kerja, bahan, dan kelengkapan kegiatan, menentukan waktu, tempat, peserta, dan narasumber kegiatan, mengimplementasikan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan Islam, memantau dan mengendalikan teknis pelaksanaan program kerja, data, dan perlengkapan, mengkoordinasi implementasi pengelolaan dengan unit atau instansi lain dan melaporkan hasil pengelolaan pendidikan sebagai pertanggungjawaban Kemenag Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendidikan bagi guru-guru PAI selalu melaporkan hasil kegiatannya.

REFERENSI

- Achadi, M. W. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Al Ghazali*, 1(2), 152–167.
- Arcaro, J. S. (2007). *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Pustaka Pelajar.
- Dhuka, M. N. (2022). Perencanaan Strategis Mutu Pendidikan Agama Islam. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(4), 287–298.
- Dunan, H. (2018). Upaya Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur. *Jurnal An-Nizom*, 3(2).
- Dwimawanti, I. (2004). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*.
- Fitri, M. (2016). Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Konstelasi Global. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Diponegoro.
- Lukman, S. (1999). *Manajemen kualitas pelayanan*. PT.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.01.
- Muhaimin, H. (2010). *Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Kencana.
- Munir, A., & Saifulloh, M. D. (2020). Manajemen pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 285–312.
- Nelly, Chandra, P., & Marhayati, M. F. (2020). Pendekatan Kognitif Sosial pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 3(2).
- Nurdiansyah, A. S. (2016). *Profesionalisme Guru Dan Tantangan Kedepan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Era Global*. Jurnal Universitas Negeri Malang.
- Ramadhan, S. (2021). Manajemen Pendidikan Islam Dalam Menjaga Kualitas Pembelajaran Di Tengah Pandemi Covid-19. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 143–149.
- Shodiq, M., & Ahmad, L. P. (2020). Membaca Al-Qur'an dan Proporsi Mengkhatamkannya Perspektif HR Ibnu Majah No. 1.363. *Jurnal STIU Darul Hikmah*, 6(2), 143–148.
- Shofiyullahul, K., & Kasanova, R. (2020). Manajemen Pondok Pesantren Di Masa Pandemi

Covid-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro).
Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter, 3(1), 26–30.

Sidi, I. D. (2001). *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Paramadina.

Sofyan, M., & Iqbaltullah, S. K. A.-Z. (2021). Meninjau Manajemen Pendidikan Islam Secara Deskriptif Guna Mewujudkan Pendidikan Berkemajuan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(8), 1353–1364.

Susanti, & Sa'ud, U. S. (2016). Efektifitas Pengelolaan Pengembangan Profesionalitas Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXIII(2), 37–51.

Thoha, C. (1999). *Metodologi Pengajaran Agama*. Pustaka Pelajar.

Tjiptono, F. (2000). *Manajemen Jasa*. Andi.

Wahono, M., Thoha, C., Nelly, Chandra, P., Marhayati, M. F., Achadi, M. W., Susanti, Sa'ud, U. S., Nurdiansyah, A. S., Dhuka, M. N., Ramadhan, S., Munir, A., Saifulloh, M. D., Shofiyullah, K., Kasanova, R., Muhaimin, H., Sofyan, M., Iqbaltullah, S. K. A.-Z., Shodiq, M., ... Raharjo, M. M. (2018). Pendidikan Karakter: Suatu Kebutuhan Bagi Mahasiswa di Era Milenial. *Integralistik*, 29.2(no.2), 145–151.